

Pertemuan 7:

Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia

Bayangkan sistem keuangan sebagai sebuah orkestra. Agar musiknya harmonis, dibutuhkan dua peran utama: seorang konduktor yang mengatur tempo dan irama secara keseluruhan (Bank Indonesia), dan seorang inspektur yang memastikan setiap alat musik dalam kondisi prima (Otoritas Jasa Keuangan).



Tujuan Utama Bank Indonesia

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 (jo. UU No. 6 Tahun 2009), Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal yang sangat jelas dan fokus.

Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah

Stabilitas rupiah mencakup dua aspek penting: stabilitas terhadap barang dan jasa (inflasi rendah) serta stabilitas terhadap mata uang asing (nilai tukar stabil).

Contoh nyata: Tahun 2022, inflasi Indonesia terjaga di bawah 5% walaupun harga minyak dunia melonjak, karena BI menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebagai respon.



Tiga Pilar Tugas Utama Bank Indonesia

01

Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Mengendalikan jumlah uang beredar melalui BI-Rate, Giro Wajib Minimum (GWM), dan Operasi Pasar Terbuka (OPT). Contoh: BI menaikkan suku bunga ketika inflasi tinggi agar masyarakat lebih suka menabung.

02

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Menyediakan instrumen pembayaran seperti uang kartal dan mengembangkan sistem digital seperti BI-FAST dan QRIS. Sejak 2021, QRIS memungkinkan transaksi dengan 1 QR Code di berbagai aplikasi.

03

Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Melakukan pengawasan makroprudensial untuk mencegah risiko yang dapat meruntuhkan keseluruhan sistem keuangan, seperti mencegah terjadinya credit bubble.

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah

Independensi dan Koordinasi

Bank Indonesia adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi pemerintah dalam kebijakan moneter. Namun, BI tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam penetapan kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pemerintah tidak bisa memaksa BI mencetak uang untuk membiayai APBN, menjaga kredibilitas dan stabilitas mata uang.



Ilustrasi: BI sebagai "rem" mobil dan Pemerintah sebagai "gas" mobil. Pemerintah bisa mempercepat ekonomi lewat belanja negara, tapi BI bisa mengerem jika inflasi terlalu tinggi.

Kerja Sama Internasional Bank Indonesia



Forum Internasional

BI aktif di lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan BIS untuk menjaga stabilitas keuangan global.



Kerja Sama Bilateral

Menjalin kerja sama dengan bank sentral lain, seperti currency swap agreement dengan Bank of Japan untuk menstabilkan rupiah saat gejolak nilai tukar.



Representasi G20

Mewakili Indonesia dalam forum G20 di bidang keuangan untuk koordinasi kebijakan ekonomi global.

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK dibentuk melalui UU No. 21 Tahun 2011 untuk menggantikan fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya dipegang Bank Indonesia. Pembentukan OJK bertujuan menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

1 Sebelum 2011

BI mengawasi perbankan, Bapepam mengawasi pasar modal, Departemen Keuangan mengawasi IKNB

2 2011

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK disahkan

3 2013-2014

OJK mengambil alih fungsi pengawasan dari berbagai lembaga



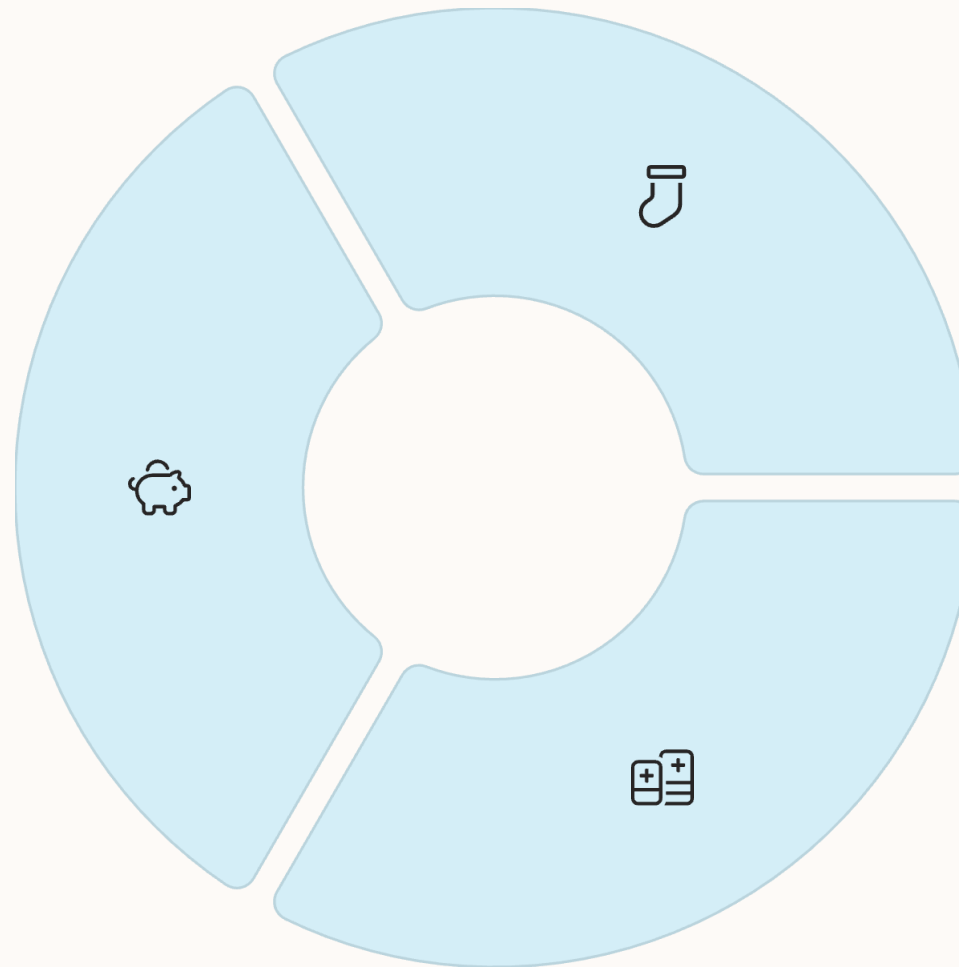
Struktur Organisasi OJK



Tiga Pilar Pengawasan OJK

Sektor Perbankan

Memastikan setiap bank (BCA, Mandiri, BPR, dll.) sehat, dikelola dengan baik, dan mematuhi aturan Good Corporate Governance.



Sektor Pasar Modal

Mengawasi Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan emiten (perusahaan Tbk).

Sektor IKNB

Mengawasi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan (leasing), dan fintech.

Fungsi dan Peran Modern OJK



Regulasi

Menyusun aturan sektor keuangan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.



Pengawasan

Memastikan bank, pasar modal, dan industri non-bank sehat serta patuh terhadap regulasi yang berlaku.



Perlindungan Konsumen

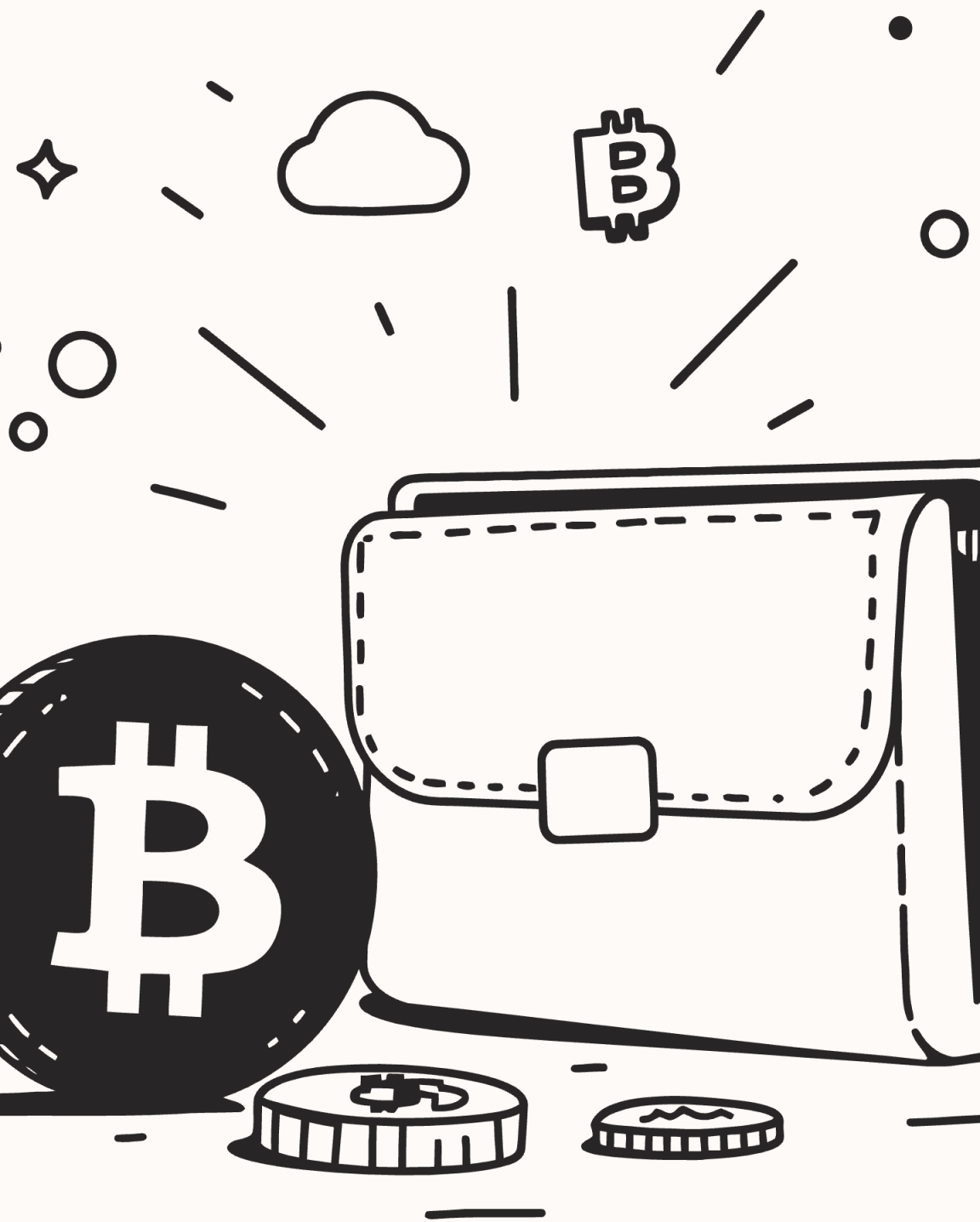
Mengawasi produk keuangan agar tidak merugikan masyarakat, seperti melarang investasi bodong dengan skema ponzi.



Edukasi Keuangan

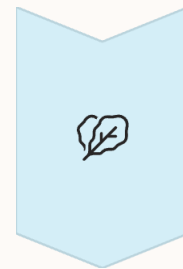
Meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program dan kampanye edukasi.

Contoh konkret: OJK mengawasi perusahaan fintech agar tidak mengenakan bunga atau biaya berlebihan kepada konsumen.



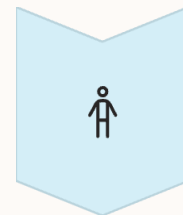
Keuangan Berkelanjutan dan ESG: Masa Depan Industri Keuangan

OJK kini memfokuskan pada Sustainable Finance dan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), menunjukkan bahwa profitabilitas harus sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.



Environmental

Dampak aktivitas bisnis pada lingkungan, seperti emisi karbon dan pengelolaan limbah.



Social

Interaksi perusahaan dengan karyawan, pemasok, dan masyarakat sekitar.



Governance

Tata kelola perusahaan, transparansi, hak pemegang saham, dan etika bisnis.

OJK telah meluncurkan "Taksonomi Hijau Indonesia" sebagai panduan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi ramah lingkungan. Bank kini harus memasukkan analisis risiko ESG saat memberikan kredit, mendorong seluruh sektor ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.

Thank
you!